

**BAB IV**  
**FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN SUDAN**  
**MENGAMBIL KEPUTUSAN UNTUK REFERENDUM SUDAN**  
**SELATAN.**

Beberapa faktor yang menyebabkan pemerintah Sudan mengambil kebijakan referendum untuk menyelesaikan konflik di Sudan Selatan :

**1. Latar belakang domestik**

Sebagian besar perpecahan internal seringkali dapat ditemukan di negara-negara dalam Afrika. Bahkan perpecahan internal ini berkembang tidak hanya sebatas perpecahan pada kesatuan rakyat sebuah negara, akan tetapi masuk di tingkatan konflik atau perang sipil/saudara. Perang saudara biasa terjadi akibat perbedaan paham antar kedua pihak, bahkan sampai konflik antar agama dan etnis yang tidak mampu hidup harmonis bersama dalam sebuah negara. Dan perpecahan tersebut menjadi dasar yang paling kuat dalam pengambilan keputusan akan referendum Sudan.

Perpecahan internal yang terjadi di Sudan dapat dilihat dari beberapa kasus yang terjadi di Sudan. Pertama di Darfur sejak 2003, dimana pokok permasalahannya terletak pada meningkatnya gerakan-gerakan yang menentang pemerintahan pusat Omar Al-Bashiir. Pembersihan etnis terjadi, menghasilkan ratusan ribu warga meninggal, serta jutaan mengungsi ke negara tetangga. Kedua adalah kasus antara Sudan Selatan, serta Sudan Utara. Latar belakang konflik ini

sebab adanya ketidakadilan dalam pemerintahan pusat, terhadap hak-hak warga di Sudan Selatan. Dari segi politik dan ekonomi, Sudan Selatan sering tidak dianggap dalam keputusan politik, serta proliferasi ekonomi ke daerah tersebut, menyebabkan ketidaksetaraan lapangan pekerjaan dan perkembangan daerah. Sering pula terjadi eksploitasi di daerah Sudan Selatan oleh pemerintahan pusat yang berlokasi di Sudan Utara.

Seringkali dikatakan bahwa latar belakang konflik internal antara Sudan Selatan dan Utara tidak hanya di motivasi oleh sebab-sebab diatas, tetapi juga berhubungan dengan diskriminasi ras dan agama oleh pemerintahan pusat. Sehingga dikatakan bahwa konflik internal yang terjadi di Sudan juga merupakan konflik antar agama, sekaligus ras. Dari segi agama, daerah Sudan Utara memiliki mayoritas penduduk beragama Islam, dan merupakan ras Arab. Sedangkan di Sudan Selatan, mayoritas penduduk beragama Kristen, dan ras kulit hitam. Pemerintahan pusat yang berpegang teguh pada ideologi Islam, kerap menganggap bahwa penduduk Arab Islam lebih superior dibandingkan mereka yang berkulit hitam dan beragama Kristen.<sup>80</sup> Diskriminasi inilah yang menjadi salah satu sebab terjadinya konflik yang paling lama, di negara Afrika yang paling besar saat ini. Namun untuk menganalisa sumber konflik antar Sudan Utara dan Selatan, perlu dianalisa sejak masa penjajahan Inggris dan Mesir.

Dari Segi historis, pada saat penjajahan Inggris, telah terjadi eksploitasi, serta ketidaksetaraan perkembangan yang diperkenalkan oleh penjajahan Inggris

---

<sup>80</sup> Deng D. Akol Ruay, *The Politics of the Two Sudans*, Uppsala: The Scandinavian Institute of African Studies, 1994, h.56

sebelum kemerdekaan.<sup>81</sup> Kolonialisasi Inggris gagal untuk membentuk mekanisme yang lebih baik dalam hal transisi kekuasaan Inggris, ke Sudan itu sendiri, serta gagal untuk mempersiapkan kebutuhan Sudan Selatan sebelum kemerdekaan. Warga Sudan selatan seringkali diculik demi kepentingan perdagangan perbudakan. Perkembangan lebih difokuskan di daerah Sudan Utara. Akibatnya, dari segi ekonomi, kesempatan politik, serta pendidikan, Warga Sudan Selatan tidak mampu untuk bersaing dengan Sudan Utara.

Kemerdekaan di tahun 1956 memberikan harapan besar bagi rakyat Sudan Selatan untuk mendapatkan kesempatan yang sama dari segi pendidikan, politik, ekonomi, serta perkembangan yang merata. Tidak hanya berfokus di daerah Sudan Utara. Namun, kemerdekaan menjadi ajang memperlebar jarak perkembangan antar kedua wilayah tersebut. Sudan Utara meneruskan kebijakan yang sebelumnya diaplikasikan oleh penjajahan dari Inggris. Pemerintahan pusat terus menerus mengaplikasikan program perkembangan ekonomi regional tidak merata, dan kebijakan-kebijakan lainnya yang tidak memberikan kesempatan kepada Sudan Utara untuk berkembang. Harapan Sudan Selatan untuk mengembangkan wilayah, serta membentuk negara persatuan yang lebih ternyata telah memperburuk keadaan dan memperbesar diskriminasi tersebut.

Struktur pemerintahan Sudan pasca kemerdekaan juga mencurigakan. Sebab *civil service* atau departemen-departemen pemerintahan di Sudan Selatan, semua merupakan warga dari Sudan Utara. Sehingga muncul-lah beberapa perspektif dari masyarakat Sudan Selatan, bagaimana Sudan Utara memiliki insentif untuk

---

<sup>81</sup> *White Paper on the Sudan*, London: Royal Institute, 1958, h. 10.

menguasai Sudan secara keseluruhan. Tentunya hal tersebut ditanggapi serius oleh semua rakyat Sudan Selatan.

Namun yang merefleksikan kebijakan diskriminatif adalah penyebaran Islam, bahkan di Sudan Selatan itu sendiri. Setelah kemerdekaan, hanya 6 individual dari Sudan Selatan yang dijabat sebagai posisi administrative Sudan. Sehingga banyak terjadi penyebaran ideologi Islam pasca kemerdekaan tersebut. Februari 1962, pemerintahan pusat menutup secara paksa sekolah-sekolah Kristen.<sup>82</sup> Juga muncul beberapa usaha pemerintah untuk menerapkan hukum Syariah, sebuah hukum yang menggunakan hukum agama Islam sebagai pedoman. Tentunya ini ditanggapi dengan penuh kemarahan oleh rakyat Sudan Selatan, dan semua penduduk Sudan yang beragam Kristen. Bukan hanya itu, penyebaran ini dilakukan dengan niat memaksa semua rakyat menerima hukum tersebut.<sup>83</sup>

Masyarakat yang merasa tertindas, terutama dalam hal kebebasan agama, serta kesempatan dalam kontribusi ekonomi negara yang tidak merata telah menyebabkan perang sipil selama bertahun-tahun di Sudan. Perang Sipil pertama pada tahun 1955-1972, dilanjut pada perang sipil kedua tahun 1983-2005. Merupakan perang Sipil paling lama, serta paling banyak menelan korban.

### 1. Perang sipil pertama (1955-1972)

Perbedaan antara Sudan Selatan dan Utara sebenarnya berawal dari masa penjajahan Mesir di Sudan pada abad ke-19. Dimana warga berkulit hitam

---

<sup>82</sup> Charles Gurdon, *Instability and the State: Sudan*, London: Macmillan, 1989, h.107.

<sup>83</sup> *Journal of Modern African Studies*, Volume 45, Part 1, 2007, h. 82.

seringkali dijadikan sebagai budak. perbedaan serta jarak kesetaraan hak antara warga Arab dan kulit hitam kemudian diperlebar setelah masa penjajahan Inggris dan Mesir, dimana diskriminasi tersebut terus-menerus berlanjut. Setelah Februari 1953, diputuskan bahwa Sudan berhak atas kemerdekaan. Hal ini dilanjutkan oleh transisi kekuasaan pertama melalui pemilihan anggota parlemen tahun 1954.<sup>84</sup>

Partai-partai politik pun bermunculan. NUP (National Union Party) yang anggotanya mayoritas merupakan warga dari Sudan Utara, dan juga Liberal Party yang anggotanya mayoritas merupakan warga dari Sudan Selatan, merupakan beberapa contoh partai politik yang ikut bersaing dalam pemilihan tersebut. Hasilnya, mayoritas parlemen diduduki oleh anggota NUP, partai politik yang begitu menerapkan ideology *anti-unionist* (berdiri sendiri, dan tidak ingin adanya integrasi dengan partai politik lainnya).

Melihat keadaan tersebut, anggota Liberal Party yang terpilih dalam parlemen berusaha mengusulkan sebuah pemerintahan federal, yang memberikan Sudan Selatan administrative yang berbeda dengan Sudan Utara. Hal tersebut merupakan upaya Sudan Selatan dalam membentuk sebuah pemerintahan yang benar-benar tidak diskriminatif, dan berusaha memperbaiki keadaan warga negara yang berada di Sudan Selatan. Usulan tersebut mendapatkan tanggapan yang positif oleh anggota parlemen lainnya, termasuk mayoritas anggota dari NUP. Namun, ternyata tanggapan positif tersebut hanya sebagai janji yang tidak mungkin terealisasi. Janji dengan harapan akan mendapatkan suara dan dukungan dari rakyat Sudan Selatan.

---

<sup>84</sup> Sudan – First Civil War. [www.globalsecurity.org/military/world/war/sudan-civil-war1.htm](http://www.globalsecurity.org/military/world/war/sudan-civil-war1.htm).

Departemen pemerintahan serta posisi-posisi tinggi daerah di Sudan Selatan banyak dijabatani oleh warga Sudan Utara. Dari sini-lah banyak curigaan bahwa pemerintahan yang baru saja terbentuk, berusaha menyebarkan kekuasaannya, Sudan Selatan termasuk dalam cakupannya. Seiring dengan waktu, di level nasional posisi-posisi tinggi dalam militer, administrasi, serta kepolisian diduduki oleh warga negara Sudan Utara.

Mengatasi kemungkinan pemerintahan yang dikendalikan oleh Sudan Utara, maka mulai-lah banyak gerakan bermunculan, berusaha menentang sistem pemerintahan yang terjadi pada saat itu. Menuntut kesetaraan suara politik, dan berharap agar aspirasi mereka akan pemerintahan federal dapat dijadikan konsiderasi. Namun awal mula konflik terjadi adalah pada 18 Agustus 1955. Sebuah unit militer yang bernama *Equatoria Corps*. Yang terdiri atas warga negara Sudan Selatan, menolak untuk mematuhi perintah dari pemerintah saat itu, yaitu Al-Azhari.<sup>85</sup> Gerakan tersebut telah menewaskan begitu banyak pejabat dari Sudan Utara, termasuk dari militer dan kepolisian.

Bentuk kekecewaan akan pemerintahan pusat tersebut bukannya memperlambat ataupun menunda kemerdekaan, namun malah mempercepat prosesnya. Inggris merasa berada dalam posisi yang tidak mampu untuk memperbaiki kekacauan yang terjadi, sehingga memiliki insentif yang besar untuk memberikan Sudan kemerdekaannya. Bahkan di saat dimana belum ada kesepakatan masalah konstitusi dasar negara yang ditetapkan oleh parlemen. Sehingga kemerdekaan dipercepat, pada tanggal 1 Januari 1956.

Namun kemerdekaan ternyata tidak membawa Sudan pada kesatuan negara yang lebih utuh. Pasukan pemberontak dari *Equatoria Corps*/ gerakan yang biasa disebut *The Torit Mutiny*, ternyata bukanlah gerakan pemberontakan yang berlangsung selama berminggu-minggu saja. Memang benar bahwa gerakan pemberontakan di tahun 1955 tersebut berskala kecil, dan tidak membawa dampak/ perubahan yang signifikan di Sudan, namun gerakan tersebut telah memberikan inspirasi bagi warga negara Sudan di bagian Selatan untuk ikut serta dalam gerakan pemberontakan tersebut. *The Torit Mutiny* telah memberikan refleksi bahwa mayoritas Sudan Selatan tidak menyetujui sistem pemerintahan yang diaplikasikan saat itu. Berusaha memperlihatkan kepada bukan hanya Sudan Utara, tetapi kepada seluruh dunia bahwa mereka tidak ingin terjadi kesatuan politik antara Sudan Selatan dan Sudan utara, bahkan sejak kemerdekaan.<sup>86</sup>

Nampaknya gerakan pemberontakan *The Torit Mutiny* ini telah membangkitkan kesadaran warga negara Sudan di Selatan bahwa mereka tidak diberikan hak yang sama dalam pemerintahan Sudan secara keseluruhan. Sehingga pemberontakan pertama ini telah dengan sukses memunculkan gerakan-gerakan pemberontakan lainnya di daerah Selatan. Gerakan pemberontakan telah membesar membentuk kelompok pemberontak yang terdiri atas gerakan pemberontakan pertama di Torit, serta pelajar dari Sudan Selatan yang juga ingin berpartisipasi dalam pemberontakan tersebut. Kelompok ini-pun membentuk pasukan gerilya *Anya Nya*. Dari hal tersebut, gerakan pemberontakan *The Torit*

---

<sup>86</sup> The Torit Mutiny.

[http://www.dailymail.co.uk/news/uknews/uknews?name=News&file=article&cid=2171](#). Diakses tanggal 3

*Mutiny* menjadi sumber perang sipil pertama di Sudan, atau yang biasa disebut sebagai perang Anyanya pertama.<sup>87</sup>

Arti nama Anya Nya adalah Ular berbisa. Anya Nya merupakan sebutan dari para pemberontak yang berusaha melawan pemerintahan pusat (yang dikuasai Sudan Utara saat itu). Berbeda dengan *The Torit Mutiny*, Anya Nya ini melakukan operasi pemberontakan dalam skala yang lebih besar, terdiri dari berbagai etnis dari Sudan Selatan, serta persenjataan yang lebih mendukung. Pada saat gerakan pemberontakan di Torit tahun 1955, persenjataan sangat terbatas. Mayoritas dicuri dari departemen kepolisian Sudan, ditambah operasi yang biasa hanya dilakukan di daerah hutan dan tempat-tempat yang tersembunyi. Sehingga gerakan pemberontakan oleh Anya Nya ini jauh apabila dibandingkan dengan sebelumnya.

Pasukan persenjataan Anya Nya banyak dibantu oleh konflik yang terjadi di luar Sudan. Pada tahun 1965, negara-negara Arab, serta Afrika menunjukkan dukungannya terhadap gerakan *Simba* di Kongo. Persenjataannya pun dikirim lewat jalur daratan. Namun persenjataan yang diharapkan jatuh ke tangan gerakan *Simba*, malah jatuh ke tangan pasukan pemberontakan Anya Nya. Gerakan pemberontakan ini telah berlangsung selama beberapa tahun, yakni dari tahun 1963-1969.<sup>88</sup>

Begitu banyak pergerakan pemberontakan yang berlangsung saat itu, menentang pemerintahan yang didominasi oleh Sudan Utara, sehingga beragam

---

<sup>87</sup> South Sudan celebrates the first rebellion, the Torit Mutiny. [www.sudantribune.com/South-Sudan-celebrates-Torit.28325](http://www.sudantribune.com/South-Sudan-celebrates-Torit.28325). Diakses tanggal 3 Juli 2011.



kelompok gerakan pemberontakan tersebut tidak mewakili satu suara. Sehingga upaya negosiasi yang dilakukan selalu gagal, sebab adanya perbedaan pendapat, ataupun latar belakang etnis yang menghambat prosesi negosiasi. Sehingga di pada Januari 1971, mantan letnan tentara Sudan, Joseph Lagu mengumpulakn dan menyatukan semua kelompok gerakan pemberontakan kedalam sebuah gerakan yang disebut SSLM (Southern Sudan Liberation Movement) atau disebut Gerakan pembebasan Sudan Selatan. Ini adalah pertama kalinya struktur komando terstruktur untuk pencapaian tujuan yang sama. Alhasil gerakan ini melakukan berbagai macam negosiasi dengan pihak pemerintahan pusat untuk mencapai sebuah perjanjian yang dapat disepakati bersama.

Pembentukan SSLM ini memberikan kekuatan yang baru bagi gerakan pemberontakan. Tersedianya pasukan persenjataan, dan perluasan operasi yang dilaksanakan telah merefleksikan kekuatan militer yang patut diperhitungkan. Dengan adanya struktur komando yang lebih jelas, strategi, serta gerakan yang dilakukan para pemberontak semua terstruktur, dan semakin menekan pemerintahan pusat untuk mengapresiasi suara dari Sudan Selatan. Pada akhirnya, SSLM diakui sebagai organisasi yang masuk dalam aktor negosiasi, menunjukkan bahwa SSLM telah memberikan kemajuan dalam pergerakan pemberontakan yang telah berlangsung sejak tahun 1955.

Tertekan oleh gerakan pemberontakan yang terjadi di daerah Sudan Selatan, maka di tahun 1972, dibuatlah perjanjian antara pemerintahan pusat dan SSLM (*Southern Sudanese Liberal Movement*). Perjanjian ini disebut sebagai *The 1972*

1111 1111 1111 ditandatangani oleh presiden Sudan saat itu (Presiden

Jafaar Muhammad An-Numeiry) dan Joseph Lagu dari Anya Nya, yang pada akhirnya membawa akhir dari perang sipil pertama di Sudan (1955-1972).<sup>89</sup>

Perjanjian Addis Ababa bertujuan untuk menghentikan konflik yang telah berlangsung selama 17 tahun. Saat perang sipil yang terjadi saat itu menelan begitu banyak korban, serta menghabiskan sumber daya Sudan Utara yang tergolong banyak, saat itulah pemerintahan pusat ingin melakukan negosiasi dengan pihak gerakan pemberontakan. Sebagai *bargaining power*, perjanjian ini memberikan Sudan Selatan otonomi daerah, yairu otoritas untuk menjalankan pemerintahan di daerah tersebut.

Perdamaian terjadi selama beberapa tahun. Namun perjanjian Addis Ababa ternyata merupakan solusi jangka pendek dari konflik yang telah berlangsung puluhan tahun. Intergrasi yang dipaksakan tidak akan menghasilkan apa-apa. Banyak permasalahan yang muncul setelah perjanjian Addis Ababa ini. Integrasi unit militer nasional yang diusulkan menghasilkan banyak curigaan dan ketidakmampuan untuk saling percaya antara pasukan bersenjata Sudan Selatan dan Utara. Perkembangan ekonomi yang tidak setara juga mewarnai kegagalan integrasi negara Sudan.

Dalam perjanjian Addis Ababa, pasukan militer menjadi topik pembahasan utama, sebab berhubungan dengan keamanan negara. Pihak pemberontak dari SSLM menginginkan adanya 3 macam militer Sudan. Tentara Sudan Utara, Sudan Selatan, serta tentara nasional (yang terdiri dari pasukan kedua pihak). Hal ini diusulkan demi tetap menjaga keamanan dari Sudan Selatan, dari kemungkinan

---

<sup>89</sup> 1972 Addis Ababa Agreement (for the Sudan).

[www.Africahistory.about.com/od/glossary2/g/1972-Addis-Ababa-agreement.htm](http://www.Africahistory.about.com/od/glossary2/g/1972-Addis-Ababa-agreement.htm) Diakses

serangan dari Sudan utara. Karena tidak disepakati, maka diterapkanlah integrasi militer, dimana di kedua wilayah (Sudan Utara dan Sudan Selatan), akan terdiri dari jumlah pasukan yang seimbang jumlahnya, antara pasukan Sudan Utara dan Selatan.

Beberapa pasukan gerilya tidak menyetujui prasyarat tersebut. Sehingga kembali mengasingkan diri di daerah kehutanan Sudan Selatan. Pasukan Sudan Selatan yang setuju tetap memiliki perasaan curiga, serta ketakutan yang besar. Kemungkinan ditugaskan ke Sudan Utara bisa berakibat fatal bagi keselamatan mereka. Sehingga beberapa pasukan lebih memilih jadi bagian unit pasukan pada saat perang sipil pertama Sudan. Pemikiran yang muncul tidak hanya itu, juga adanya rasa benci yang tetap membara dalam jiwa setiap pasukan gerilya tersebut. Semua permasalahan integrasi diatas sangat fatal dalam bidang militer, sebab konsentrasi tingkat tinggi akan selalu dibutuhkan, tanpa ada hambatan seperti ketidakpercayaan, atau bahkan rasa benci antar sesama pasukan dalam unit militer.

Dalam perjanjian Addis Ababa, proses integrasi militer ini berlangsung selama 5 tahun. Setelah 5 tahun, integrasi militer tidak juga ditemukan. Bisa dilihat bagaimana masih banyak mantan pemberontak yang tidak diterima ataupun tidak mau menjadi bagian dari pasukan militer nasional, sehingga mengasingkan diri ke tempat yang tersembunyi. Kenyataan bahwa beberapa petinggi-petinggi pasukan gerilya mendapat jabatan yang rendah dalam pasukan militer nasional yang baru saja terbentuk juga telah mengurangi insentif para gerilya tersebut untuk ikut serta menjadi bagian dari militer. Jadi sangat jelas bahwa perjanjian

Addis Ababa dari segi integrasi militer telah gagal, karena tidak memperhatikan unsure kebencian dan rasa curiga antar Sudan Selatan dan Utara yang telah berada dalam konflik internal selama 17 tahun.

Namun masalah yang juga muncul dalam perjanjian Addis Ababa adalah dari segi perkembangan Sudan Selatan pasca perjanjian. Dalam perjanjian, Sudan Selatan berhak atas otonomi daerah Sudan Selatan, yang berarti Sudan Selatan waktu itu memiliki hak untuk mengembangkan perekonomiannya dengan sendiri, serta mendapatkan bantuan perkembangan berupa insentif finansial kepada Sudan Selatan. Tak satupun yang terealisasi.

Proyek perkembangan ekonomi yang telah dijanjikan oleh Sudan Utara gagal diaplikasikan pasca perjanjian Addis Ababa. Bahkan selama 11 tahun otonomi daerah tersebut, Sudan Selatan telah diabaikan oleh Sudan Utara untuk pemberian kesempatan perkembangan ekonomi yang setara dengan utara. Memang perkembangan ekonomi Sudan Selatan selama pasca perjanjian ditandatangani ada, namun tidak signifikan untuk proliferasi ekonomi domestic Sudan Selatan itu sendiri. Otonomi dalam bidang pendidikan, perkembangan regional, serta ekonomi telah membangkitkan amarah warga Sudan Selatan yang merasa ketidakadilan tetap terjadi.

Sistem otonomi daerah Sudan Selatan yang dijanjikan dalam perjanjian Addis Ababa ternyata berbeda dengan yang diharapkan oleh SSLM (*Southern Sudan Liberal Movement*). Yang diharapkan oleh pihak pemberontak adalah sistem federalisme sebagai bentuk negara Sudan, dimana nantinya pemerintahan baru Sudan Selatan memiliki hak untuk mengembangkan wilayahnya sendiri dan

menentukan beberapa kebijakan khusus Sudan Selatan. Hal ini untuk mengatasi beberapa kebijakan Sudan Utara yang tidak sepadan dengan Sudan selatan. Namun seiring dengan waktu, pemerintah pusat banyak melakukan intervensi pada sistem pemerintahan dan pembuatan kebijakan Sudan Selatan. Tidak memberikan bantuan perkembangan yang telah dijanjikan. Serta tidak diberikan otonomi dalam berbagai bidang esensial dalam negara.

Berbicara mengenai intervensi pemerintahan pusat terhadap Sudan Selatan, tentunya tidak lepas dari sistem politik dalam Sudan Selatan itu sendiri. Perjanjian Addis Ababa membentuk sebuah dewan yang disebut Dewan Eksekutif Sudan Selatan, yang menjalankan sistem pemerintahan dalam otonomi daerah Sudan Selatan. Dalam pemilihan Ketua Dewan Eksekutif tersebut, seringkali terjadi intervensi dari pemerintahan pusat. Walaupun banyak menghadapi hambatan dalam pembentukan negara Sudan yang baru, setidaknya perjanjian Addis Ababa ini telah menghentikan perang sipil berskala besar, yang berlangsung 17 tahun.

## **2. Perang sipil kedua (1983-2005)**

Perang sipil kedua Sudan dimulai tahun 1983, disebabkan oleh realisasi perjanjian Addis Ababa yang tidak sesuai harapan masyarakat di Sudan Selatan. Dalam penerapannya, pemerintahan pusat yang awal mulanya menjanjikan sebuah pemerintahan otonomi bagi Sudan Selatan, ternyata dilanggar. Kasus intervensi dalam pemilihan umum, serta pengabaian terhadap perkembangan sosio-ekonomi Sudan Selatan mewarnai 11 tahun penerapan perjanjian Addis Ababa. Seringkali

pada perjanjian Addis Ababa bukan hanya terletak pada apakah perjanjian tersebut sudah dijalankan sesuai rencana atau tidak, tetapi juga pada bagian apakah ada konsistensi dalam mematuhi/ menjalankan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak pada tahun 1972.

Sebuah perjanjian Addis Ababa pada saat itu memberikan harapan kepada rakyat Sudan Selatan akan perdamaian, serta perkembangan sosio-ekonomi daerah. Namun karena banyaknya pelanggaran terhadap perjanjian yang dilakukan oleh pemerintahan pusat di Sudan Utara, meningkatkan minat warga Sudan Selatan untuk ikut serta sebagai pasukan gerilya menentang pemerintahan pusat.

Permasalahan integrasi militer kedua pihak yang gagal ikut masuk sebagai kegagalan dari perjanjian Addis Ababa. Sejak 1980an, jumlah tentara asal Sudan Utara yang berada di Sudan Selatan mulai meningkat, melebihi jumlah pasukan Sudan Selatan. Bertambahnya pelecehan oleh pasukan militer Sudan Utara terhadap rakyat Sudan Selatan, serta bertambahnya pembunuhan, telah memperkuat refleksi bahwa integrasi antar kedua pihak tidak mungkin diaplikasikan saat ini, dan keharmonisan belum bisa terjadi pula.

Namun yang menjadikan momentum tetap untuk bangkitnya pergerakan pemberontakan tersebut adalah penyebaran Islam yang diaplikasikan oleh pemerintahan Numeiri di awal tahun 1980an. Walaupun Addis Ababa telah mengakhiri perang saudara selama beberapa tahun, namun penyebaran Islam di Sudan secara keseluruhan tidak pernah berhenti. Yang menjadi kontroversi utama adalah kebijakan pemerintahan Numeiri yang menerapkan Islamisasi (penyebaran agama Islam) termasuk dalam hukum yang disebut '*September law*'

September law merupakan sebuah hukum yang menyebarluaskan ideologi Islam melalui pengaplikasian *Syariah Law/ Hukum Syariah*.<sup>90</sup> Hukum syariah ini diaplikasikan bukan hanya di daerah Sudan Utara yang mayoritas penduduk adalah Islam, tetapi juga di Sudan Selatan, yang memiliki kepercayaan yang berbeda masalah agama. Melalui hukum syariah ini, ribuan hukuman pemukulan, amputasi, bahkan sampai eksekusi dilakukan oleh pihak yang berwenang, sebab melakukan kejahatan yang dilarang oleh agama Islam.<sup>91</sup>

Hukum Syariah ini mendapatkan banyak protes bukan hanya dari mayoritas non-Muslim di daerah Sudan Utara, tetapi juga pada komunitas Muslim secular yang ada di Sudan utara. Namun penerapan Hukum Syariah ini tidak pernah dihentikan. Semua gerakan yang menentang hukum yang controversial tersebut diabaikan. Bahkan pemerintahan-pemerintahan selanjutnya tidak pernah menghapuskan Hukum Syariah, hanya mengubah metode pengaplikasian dari Hukum Syariah tersebut.

Lanjutan perang saudara pertama di tahun 1955 sudah dapat diperkirakan pada saat itu. Adanya ketidakpercayaan yang terus-menerus lanjut terhadap pemerintahan pusat sejak pengaplikasian perjanjian Addis Ababa, Integrasi militer Sudan Utara dan Selatan yang dipaksakan, ketidaksetaraan pengalokasian sumber daya yang dialokasikan pemerintahan pusat ke Sudan Selatan, serta kebijakan radikal Islamisasi yang dilakukan dalam pemerintahan Jafaar Numeiri, jelas merefleksikan bahwa minat warga di Sudan Selatan untuk melanjutkan pemberontakan yang dihentikan tahun 1972 mulai kembali.

<sup>90</sup> Peter Woodward, *Sudan 1989-1989: The Unstable State*, Boulder: Lynne Rienner, 1990., h.123.

<sup>91</sup> *The Guardian*, "Sudan: Sharia Law", 26 June 2011.

Petinggi-petinggi Anya Nya, serta kelompok gerakan pemberontak yang ada di Sudan Selatan banyak telah tersebar ke berbagai daerah di Sudan. Yang meyakini perjanjian Addis Ababa kebanyakan masuk dalam pasukan militer nasional Sudan, dan selama beberapa tahun sejak perjanjian diterapkan, memastikan agar perjanjian tidak diingkari dan terus berjalan.

Namun beberapa kelompok yang merasa perjanjian Addis Ababa tidak memberikan jawaban atas aspirasi negara federal, serta otonomi terhadap Sudan Selatan, ternyata bersembunyi di semak-semak di daerah Sudan Selatan, bahkan sampai ke negara tetangga, Ethiopia. Salah satunya adalah Anya Nya-2. Anya Nya-2 sebelum 1980an tidak memperlihatkan eksistensinya dalam pergerakan pemberontakan, namun setelah itu mulai bergerak. Berbeda dengan Anya Nya (yang muncul pada saat perang sipil pertama Sudan), pengikut Anya Nya saat itu telah kebanyakan berada di posisi netral, dalam artian melindungi stabilitas negara, tanpa melihat adanya pihak-pihak tertentu yang mengelompokkan.

Kemungkinan perang sipil semakin menguat. Yang menjadi permasalahan bagi pihak gerilya adalah jumlah. Dimana kebanyakan pasukan Sudan Selatan saat itu melindungi perjanjian Addis Ababa. Sejak 1982, pihak pemberontak mulai melakukan komunikasi dengan pasukan Sudan Selatan tersebut. Dimana penjelasan komprehensif akan ketidakadilan pemerintahan pusat harus dihentikan. Pada tahun yang sama, 2,500 pasukan yang dahulunya netral, kembali menjadi anggota kelompok pemberontakan yang baru. Bahkan beberapa pasukan militer



Dengan kasus yang sama pada perang sipil pertama Sudan di tahun 1955, pada tahun 1983, pasukan gerilya tersebut memutuskan untuk berada dalam sebuah komando yang mampu mengintegrasikan kelompok pasukan gerilya, serta kelompok pemberontak secara keseluruhan. Terbentuk-lah SPLA/M (Southern People's Liberation Army/Movement), yang berada dalam komando John Garang. Ideologi yang muncul adalah, mereka dipersatukan atas kegagalan perjanjian Addis Ababa.

Demi mendapat jumlah pasukan yang mereka inginkan untuk peluncuran serangan, SPLA/M membentuk sebuah strategi dengan cara membuat daftar 'keluhan', yang terdiri dari kegagalan pemerintahan pusat, serta perjanjian Addis Ababa dalam menyikapi berbagai permasalahan. Dari keluhan tersebut, SPLA/M berharap bisa menemukan potensi aliansi di masa perang nantinya, serta harapan bahwa mereka bisa dipersatukan dalam sebuah komando, berdasarkan kesamaan kepentingan dalam menyikapi berbagai keluhan. Mengingat bahwa jumlah etnis yang kemungkinan akan bergabung, sangat beragam.

Beberapa keluhan yang didaftarkan adalah; intervensi pemerintah pusat pada pemilihan ketua Dewan Eksekutif, kegagalan otonomi daerah, ketidakjelasan dalam pembagian perbatasan wilayah Sudan Selatan dan Utara, pengabaian terhadap perkembangan sosio-ekonomi di Sudan Selatan, integrasi militer,

militer saat itu, serta rencana memindahkan pasukan Any Nya ke daerah Sudan utara.<sup>92</sup>

Pemerintahan Jafaar Numeiri telah memperbesar keinginan warga Sudan Selatan untuk melakukan pemberontakan melalui SPLA/M, dengan kebijakan Syariah Islam yang diterapkan saat itu. Kebijakan tersebut tidak hanya mendapat penolakan dari mayoritas Kristen di Sudan Selatan, tetapi juga antar sesama Muslim di Sudan Utara. Namun popularitas Numeiri tidak hanya jatuh disebabkan oleh Islamisasi tersebut. Masa pemerintahan Numeiri merefleksikan masa kejatuhan ekonomi paling mengkhawatirkan di Sudan. Hingga akhirnya Jafaar Numeiri di kudeta tahun 1985.<sup>93</sup>

Pemerintahan hasil pemilihan umum tahun 1986, menghasilkan Sadiq Al-Mahdi sebagai Perdana Menteri.<sup>94</sup> Sejak masa pemerintahan Sadiq, faktor eksternal banyak membentuk kebijakan politik dalam negerinya. Dukungan finansial, serta perangkat militer oleh Libya dan Amerika Serikat terus-menerus berlanjut. Pasukan militer Sudan berada dalam posisi yang sangat kuat, disebabkan oleh pemasukan persenjataan dan bantuan tersebut. Namun bantuan tersebut mengurangi insentif pemerintahan pusat untuk melakukan negosiasi ataupun perjanjian damai dengan pihak SPLA/M, yang disebabkan oleh persiapan militer untuk menghadapi gerakan pemberontakan apapun.

---

<sup>92</sup> Douglas HJohnson, *The root causes of Sudan's civil war*. Kampala: The international African institute, 2003, h.75.

<sup>93</sup> Sudan timeline. <http://www.humanrightsfirst.org/our-work/crimes-against-humanity/sudan-timeline/>. Diakses tanggal 25 Juni 2011.

<sup>93</sup> Sudan-Africa Timeline of conflict. <http://www.learntoquestion.com/seevak/groups/2006/sites/Power/SP%28Africa%29/Sudan/Time>

Selama pemerintahan Sudan, banyak gerakan militia/ bersenjata, yang berdasarkan pada kelompok-kelompok etnis dari Sudan Barat (Darfur). Kelompok-kelompok radikal tersebut dahulunya tidak membawa dampak yang besar terhadap stabilitas negara, namun sejak pemerintahan Sadiq, dukungan yang perangkat persenjataan yang diberikan telah meningkatkan gerakan kelompok-kelompok radikal tersebut, yang biasa beroperasi di daerah Sudan Selatan, yang merupakan sumber dari SPLA/M.

The Misiriyya & Rizaiyat Baqqara Murahalin merupakan satu dari beberapa kelompok radikal yang berpengaruh saat itu. Murahalin biasa beroperasi di Sudan Selatan, melakukan pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan dan penculikan. Perdagangan perbudakan saat itu kembali muncul. Wanita dan anak-anak diculik, lalu dijual di Sudan Utara untuk menjadi budak. Adanya insentif untuk ikut serta dalam kelompok radikal tersebut, sebab masalah finansial yang melanda. Konflik yang terjadi telah mempengaruhi kestabilan ekonomi Sudan secara keseluruhan, membawa kemiskinan serta deprivasi makanan di seluruh wilayah Sudan. Perdana Menteri Sadiq menunjukkan dukungan terhadap gerakan tersebut, sebab dalam operasinya, kelompok seperti Murahalin secara langsung beradu dengan SPLA/M. keadaan tersebut telah melemahkan sistem pertahanan dari SPLA/M secara signifikan.

Kenyataan bahwa adanya kelompok yang melemahkan SPLA/M, serta adanya bantuan perangkat militer dari pihak luar tidak mengurangi insentif Sadiq untuk melakukan negosiasi, serta perjanjian perdamaian dengan pihak SPLA/M.

sekaligus ketua SPLA/M, John Garang.<sup>95</sup> Sampai kepada 2 tahun negosiasi, menghasilkan beberapa prasyarat gencatan senjata. Diantaranya adalah penghapusan hukum Syariah, menghilangkan aliansi militer dengan Libya, serta Mesir, dan mengadakan konferensi pembentukan konstitusi dasar. Sadiq telah menyetujui prasyarat yang disampaikan oleh pihak SPLA/M, dan diharapkan akan diaplikasikan pada bulan September 1989.

Negosiasi yang dilakukan oleh Sadiq ternyata menghilangkan banyak dukungannya, termasuk dari pihak militer Sudan. Komandan Omar Al-Bashiir salah satunya menentang keputusan Sadiq untuk melakukan negosiasi dengan Sudan Selatan. Pihak militer merasa bahwa negosiasi dengan SPLA/M itu tidak menjadi permasalahan, yang menjadi permasalahan adalah apabila ada prasyarat yang diajukan. Disintegrasi antara pemerintahan dan militer menyebabkan kudeta militer pada Juni 1989, yang menjatuhkan Sadiq dari posisi perdana menteri. Sejak saat itu, Omar Al-bashiir menduduki posisi tertinggi negara.<sup>96</sup>

Masa kepemimpinan Omar Al-Bashiir tergolong keras. Omar dalam menghadapi masalah gerakan pemberontakan SPLA/M, tidak ingin melakukan rekonsiliasi dengan pihak pemberontak tersebut. SPLA/M dihadapkan dengan kekuatan militer yang terus menerus melakukan razia di berbagai daerah Sudan

---

<sup>95</sup> Sudan second civil war. [www.globalsecurity.org/military/world/ivar/Sudan-civil-war2.htm](http://www.globalsecurity.org/military/world/ivar/Sudan-civil-war2.htm). Diakses tanggal 1 juli 2011.

<sup>96</sup> Sudan Civil War. [http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Sudanese\\_civil\\_war](http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Sudanese_civil_war). Diakses

Selatan. Sejak tahun 1989 sampai 1990, 2000 wanita dan anak-anak diculik saat razia dilakukan, demi kepentingan bisnis perbudakan di Sudan Utara.<sup>97</sup>

Keterlibatan pihak/ negara luar dalam konflik internal Sudan sangat berpengaruh dalam hal keberlangsungan, serta arah konflik yang terjadi. Mulai dari negara tetangga seperti Ethiopia, hingga Amerika Serikat, ikut berpengaruh terhadap jalannya perang sipil tersebut. Pergantian pemerintahan Sudan menghasilkan dinamika dukungan dari pihak luar. Masa pemerintahan Numeiri ditentang oleh Kolonel Muammar Qadafi dari Libya, namun pada masa pemerintahan Sadiq dan Omar, terus menerus memberikan perangkat militer kepada Sudan.

Dinamika hubungan dapat kita lihat terutama pada kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Sudan. Sepanjang sejarah, Amerika terlihat banyak memberikan bantuan kepada pemerintahan pusat. Perubahan drastic terlihat pada masa pemerintahan Omar Al-bashiir. Sejak pemerintahan Omar, bantuan Amerika Serikat berpindah dari pemerintahan pusat, kepada pasukan pemberontak (walaupun dalam jumlah yang relatif kecil). Alasan mengapa adanya dukungan pemerintahan pusat Sudan dari awal bisa dilihat dari penyebaran paham Komunis di negara tetangga Sudan (Ethiopia dan Libya) pada masa perang dingin. Agar menghalangi penyebaran ideologi komunis masuk di Sudan, dukungan terus-menerus diberikan. Setelah kejatuhan rezim penyebar paham komunis di negara tersebut, Amerika Serikat mengurangi eksistensinya di negara Sudan.

---

<sup>97</sup> Sudan-Africa Timeline of conflict.

<http://www.learn2question.com/seevak/groups/2006/sites/Power/SP%28Africa%29/Sudan/Time>

Terorisme, serta dukungan Omar Al-Bashiir terhadap Saddam Hussein dalam *Gulf war* (Perang Teluk) juga merupakan alasan mengapa Amerika Serikat kehilangan kepercayaannya terhadap pemerintahan pusat yang saat itu dipimpin oleh Omar Al-Bashiir. Sebelum invasi Amerika Serikat di Iraq tahun 2003, Iraq menjadi aktor kunci dalam pemberian asistensi teknik kepada militer Sudan. Pemberian pelatihan militer kerap diberikan kepada Sudan dalam beberapa waktu. Bantuan yang diberikan oleh Saddam Hussein telah membangun hubungan bilateral yang sangat terikat antar kedua pihak. Pada saat Perang Teluk terjadi, Omar Al-Bashiir menunjukkan dukungannya terhadap Saddam Hussein, tindakan yang bertolak belakang dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

Terhapusnya dukungan dari Amerika Serikat tidak membawa dampak yang signifikan pada berlangsungnya perang. Penyediaan persenjataan banyak disediakan oleh beberapa negara lainnya seperti Cina, Iran, Yemen, Afrika Selatan dan negara-negara bekas blok Uni Soviet seperti Kazakhstan. Perdagangan ekspor oli antar Sudan dan Rusia juga ikut serta dalam kontribusi penyediaan perangkat militer bagi Sudan.

Masa pemerintahan Omar Al-Bashiir sangat terbuka terhadap kelompok teroris internasional, Al-Qaeda. Tahun 1991, Osama Bin Laden dan kelompok Al-Qaeda pindah ke Sudan, untuk mulai merencanakan penyerangan di luar. Osama Bin Laden pada saat itu mulai membangun markas besar di Khartoum, Sudan (Ibukota Sudan).<sup>98</sup> Sejak saat itu, tindakan terorisme pertama Al-Qaeda mulai digencarkan. Penyerangan pasukan militer di Somalia, serta pembentukan jaringan dengan

kelompok radikal lainnya di sekitaran afrika merupakan tindakan-tindakan terorisme Al-Qaeda pertama yang dilakukan. Mendapatkan tekanan dari Amerika Serikat dan Arab Saudi, Al-Qaeda berpindah markas ke Afganistan.

Omar Al-Bashiir bukanlah satu-satunya aktor yang mendapatkan bantuan asing. SPLA/M banyak mendapatkan dukungan dari pihak luar. salah satunya dari Ethiopia. Sejak berdirinya SPLA/M di tahun 1983, Ethiopia telah berkontribusi banyak terhadap penyediaan senjata militer di SPLA/M, sehingga mempengaruhi dinamika peperangan sipil yang terjadi antara Sudan Utara dan Selatan. Mengistu Haile Miriam, individual yang sangat berpengaruh di Ethiopia merupakan salah satu aliansi organisasi SPLA/M. Selama peperangan terjadi, Mengistu telah mengizinkan SPLA/M untuk bermarkas di Naru, dan memberikan kebebasan untuk melakukan perekrutan anggota pada warga Sudan yang mengungsi di Ethiopia.

Bantuan yang paling berpengaruh terhadap dinamika peperangan sipil kedua adalah pasokan persenjataan. Tidak selamanya SPLA/M diberikan bantuan perangkat persenjataan tanpa bayaran apapun. Namun seringkali persenjataan ini dapat di akses dengan mudah di Ethiopia. Pada tahun 1980an, Ethiopia banyak mendapatkan pasokan persenjataan (bantuan perangkat militer) oleh Uni Soviet. Sehingga persediaan persenjataan Ethiopia tergolong tak terbatas saat itu. Kerjasama yang intensif dengan Ethiopia yang saat itu dijalin oleh John Garang, banyak diamati sebagai bentuk kerjasama para Marxis (para pemeluk ideologi marxisme, sebuah filosofi politik yang membahas perjuangan kelas-kelas sosial).

John Garang ini adalah pemimpin pemberontakan seperti Kuba, Uganda, Chad

terutama Israel yang telah memberikan persenjataan, serta pelatihan militer kepada anggota SPLA/M.<sup>99</sup>

Perubahan posisi Amerika Serikat di awal tahun 1990an memeberikan banyak manfaat bagi pihak pemberontak. Sejak perubahan tersebtu, Amerika Serikat telah memberikan kontribusi bantuan perangkat militer secara tidak langsung, melalui Ethiopia dan Uganda.<sup>100</sup> Tahun 1993, Sudan dikatakan sebagai sebuah negara teroris. Meningkatkan bantuan finansial, serta militer kepada pihak oposisi, untuk menjatuhkan pemerintahan yang mendukung terorisme tersebut. Februari 1998, Amerika Serikat memberikan bantuan perangkat militer yang bernilai 20 juta US Dollar kepada pihak pemberontak.<sup>101</sup>

Tidak selamanya pihak pemberontak mendapatkan perangkat militer, sehingga muncul usaha mencari sumber persenjataan alternatif lainnya. Selama perang sipil kedua, sering kali terjadfi pertempuran bersenjata antar kedua belah pihak. Perangkat militer yang digunakan oleh pihak militer Sudan seringkali menjadi target pencurian oleh para pemberontak. Mulai dari kendaraan perang, tank, sampai kepada misil seringkali dicuri oleh pihak pemberontakan. Kejadian tersebut menyebabkan pertempuran yang jauh lebih berdarah dibandingkan dengan perang sipil pertama Sudan, sebab penggunaan persenjataan yang sangat kompleks.

---

<sup>99</sup> Sudan rebels advance with new weapons from Israel.

[http://216.26.163.62/2002/af\\_sudan\\_10\\_04.html](http://216.26.163.62/2002/af_sudan_10_04.html). Diakses tanggal 19 Juni 2011.

<sup>100</sup> Global trade, local impact: Arms transfers to all sides in the Civil War in Sudan.

<http://www.hrw.org/reports98/sudan/>. Diakses tanggal 19 Juni 2011

<sup>101</sup> Glickman, Harvey. *Islamism in Sudan's Civil War*. Orbis: 2000. h.103



Walaupun mendapatkan dukungan eksternal yang kuat, SPLA/M juga mengalami berbagai permasalahan secara internal selama perang sipil kedua Sudan. SPLA/M merupakan organisasi raksasa, tersebar ke seluruh wilayah Sudan Selatan dan berbagai daerah lainnya, terdiri atas etnis yang beraneka ragam dan menghadapi berbagai perbedaan ideologi. Di masa pemerintahan Omar Al-bashiir di awal tahun 1990an, terjadi perpecahan internal dalam SPLA/M. Jumlah pasukan SPLA yang semakin bertambah, dan berasal dari latar belakang yang berbeda, menyebabkan terjadinya perpecahan dan perbedaan pendapat dalam organisasi tersebut. Memberikan kesempatan kepada militer Sudan untuk memanfaatkan konflik internal yang sedang dialami.

Beberapa masalah utama yang dihadapi SPLA/M sebagai sebuah organisasi saat itu adalah permasalahan finansial, strategi operasi militer, informasi aliansi eksterna, serta prosesi negosiasi perdamaian dikendalikan oleh beberapa individual dalam SPLA/M, sehingga masalah akuntabilitas tidak jelas. John Garang yang sulit dijangkau menambahkan masalah kohesitas unit pasukan pemberontak yang akibatnya berkurang.

Permasalahan utama dalam SPLA/M bersumber pada ketuanya, yaitu John Garang. Adanya sistem akuntabilitas yang tidak dapat dipercaya oleh para anggota merupakan permasalahan kecil dibandingkan perspektif anggota terhadap ketua SPLA/M itu sendiri. John Garang banyak dianggap sebagai seorang dictator dan melakukan kebijakan yang kontroversial. Pembentukan sistem dimana formulasi strategi dan kebijakan yang terpusat kepada beberapa orang merupakan salah satu

juga dilatarbelakangi kenyataan bahwa John Garang berasal dari sebuah kelompok etnis yang jadi mayoritas di Sudan Selatan, sehingga faktor ketakutan juga didominasi oleh beberapa anggota didalam.

Ditahun 1990-1991, mulai muncul gerakan yang mendukung kudeta John Garang. Gerakan kudeta tersebut diketuai oleh komandan senior Riek Machar, dan lam Akol.<sup>102</sup> Aspirasi mereka adalah menjatuhkan John Garang, sebab organisasi tersebut membutuhkan prosesi akuntabilitas lebih, serta demokrasi dalam sistem pembuatan kebijakan dalam organisasi SPLA/M. Rencana kudeta tersebut telah disebarluaskan kepada keseluruhan anggota SPLA/M, juga lewat media radio demi mendapatkan banyak dukungan. Harapan kedua komandan tersebut adalah John Garang mundur dari posisinya, agar digantikan oleh mereka. Pernyataan masalah apresiasi demokrasi, serta sistem akuntabilitas yang lebih jelas merupakan argument yang digunakan agar pendukung mereka meningkat pada saat John garang turun.

Rencana menjatuhkan pemimpin SPLA/M saat itu dinamakan sebagai *the Nasir Command/ Nasir Faction*. Seiring dengan waktu, antara tahun 1991-1994, *Nasir Faction* ini banyak mendapatkan dukungan dari sesama anggota SPLA/M. *Nasir Faction* ini bahkan melakukan peperangan dengan pasukan SPLA/M yang diketuai oleh John Garang. Terjadi degradasi kekuatan militer SPLA/M dari segi jumlah pasukan, serta penguasaan wilayah (jatuh di tangan *Nasir Faction* pada saat peperangan terjadi). Melihat potensi kekuatan *Nasir Faction*, yang mampu melakukan dampak yang besar terhadap kekuatan SPLA/M, pemerintahan Omar

---

Al-Bashiir memberikan bantuan perangkat persenjataan kepada *Nasir Faction*. Banyak nyawa yang melayang akibat peperangan antar kedua pihak tersebut.

Nasir Faction seiring dengan waktu dikalahkan oleh kepemimpinan John Garang di SPLA/M. Namun gerakan separatis tersebut telah menghasilkan berbagai perpecahan dalam kubu SPLA/M. Walaupun gerakan tersebut tidak signifikan dengan Nasir Faction, gerakan tersebut membuka jalan bagi Omar Al-Bashiir untuk melakukan penyerangan terhadap kelompok pemberontak tersebut.

Usaha penyelesaian konflik sering dilakukan bukan hanya oleh kedua pihak (SPLA/M dengan Omar Al-Bashiir), namun juga ada campur tangan pihak luar. Tahun 1993, pemimpin dari Ethiopia, Uganda, dan Kenya berusaha membentuk perjanjian perdamaian dan gencatan senjata antar kedua pihak, melalui organisasi IGAD (Intergovernmental Authority for Development).<sup>103</sup> Pada tahun 1994, IGAD berusaha mendorong prosesi dari deklarasi prinsip (*Declaration of Principles*) yang mengidentifikasi elemen-elemen dasar dalam pembentukan perdamaian di Sudan. Pemerintahan Sudan tidak menandatangani deklarasi tersebut pada awalnya. Menghadapi banyak kekalahan di medan perang dari SPLA/M, maka deklarasi ditandatangani pada tahun 1997.

Deklarasi tersebut bukan-lah deklarasi gencatan senjata, ataupun perjanjian mengikat yang akan mengakhiri perang. Deklarasi prinsip tahun 1994 oleh IGAD merupakan fondasi dasar, beberapa elemen penting dalam perumusan sebuah perjanjian perdamaian di masa depan. Beberapa poin inti dalam deklarasi tersebut,

<sup>103</sup> <http://www.afisourhistorychart.com/od/sudan/p/SudanHist3.htm>

diantaranya adalah mengakui bahwa Sudan merupakan negara multi-etnis, sehingga membutuhkan sistem pemerintahan yang dapat menghargai kenyataan tersebut melalui implementasi pemerintahan demokratis yang menghargai perbedaan agama dan etnis. Partai-partai yang terlibat dalam konflik perlu merundingkan sebuah gencatan senjata, agar perang sipil kedua dapat dihentikan secepatnya. Pembagian sumber daya yang setara antar Sudan Selatan dan Sudan utara. Adanya konstitusi yang mengakui Hak Asasi Manusia rakyat Sudan, sehingga operasi oleh pemerintahan pusat dahulunya tidak terulang.<sup>104</sup>

Tahun 2002, prosesi perdamaian dibawah perlindungan IGAD mulai terlihat progress yang signifikan. Lebih tepatnya tanggal 20 Juli 2002, aktor-aktor yang terlibat dalam konflik perang sipil Sudan kedua menandatangani sebuah protocol yang disebut sebagai *Machakos Protocol*, di Kenya.<sup>105</sup> Disetujui sebuah kerangka umum pemerintahan. *Machakos Protocol* terdiri dari prinsip pemerintahan, proses transisi, serta struktur pemerintahan.<sup>106</sup>

Dalam *Machakos Protocol*, perjanjian yang dihasilkan tidak jauh beda dengan deklarasi prinsip sebelumnya. Diantaranya memberikan hak kepada Sudan Selatan untuk menjalani sistem pemerintahan mereka sendiri, tanpa campur tangan dari Sudan utara. Memiliki hak untuk mengadakan referendum di masa yang akan mendatang, untuk menentukan bagaimana nasib Sudan Selatan nantinya. Mencari solusi yang komprehensif, serta adil dalam, dalam mengatasi

---

<sup>104</sup> Declaration of principles (IGADD/IGAD). [www.c-r.org/our-work/accord/sudan/key-texts-igad-dop.php](http://www.c-r.org/our-work/accord/sudan/key-texts-igad-dop.php). Diakses tanggal 27 Juni 2011.

<sup>105</sup> Landmark Sudanese peace agreement: Sudan government concludes with the SPLA/M "Machakos Protocol". <http://reliefweb.int/node/106448>. Diakses tanggal 28 Juni 2011.

<sup>106</sup> IGADD/IGAD. [www.c-r.org/our-work/accord/sudan/key-texts-igad-dop.php](http://www.c-r.org/our-work/accord/sudan/key-texts-igad-dop.php). Diakses

masalah ekonomi sosial yang dihadapi masyarakat Sudan. Dalam proklamasi tersebut, dijelaskan lebih terinci masalah bagaimana mekanisme transisi pemerintahan, serta struktur pemerintahan Sudan di masa depan.

Tidak lama setelah itu, pada Agustus 2002, pembahasan mengenai perjanjian perdamaian dilanjutkan. Akhirnya berakhir pada penandatanganan *Memorandum of Understanding* pada 15 Oktober 2002. Tujuan penandatanganan memorandum tersebut adalah agar terjadi sebuah situasi yang damai selama prosesi negosiasi dalam proses. Memorandum tersebut berisi beberapa poin dasar seperti kedua pihak diharuskan untuk menahan posisi militer, menahan serangan yang dilakukan pasukan militer masing-masing pihak, menahan okupasi wilayah, membekukan semua propaganda yang mungkin akan memecahkan peperangan kembali, serta menahan semua operasi pelanggaran hak asasi manusia.<sup>107</sup>

Negosiasi perdamaian terus menerus berlanjut, sampai kepada 19 November 2004. Dimana kedua pihak menandatangani sebuah deklarasi yang memberikan komitmen kepada kedua pihak untuk melakukan finalisasi perjanjian perdamaian komprehensif (*Comprehensive Peace Agreement*) sebelum Desember 2004. Akhirnya pada Januari 2005, sebuah perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh pemberontak di Selatan dengan pemerintahan Sudan, mengakhiri perang saudara kedua yang telah berlangsung 21 tahun. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh pemimpin SPLA, John Garang dengan Ali Osman Taha (wakil presiden Sudan). Perjanjian perdamaian komprehensif tersebut menyetujui gencatan senjata antar kedua pihak.

<sup>107</sup> Machakos Sudan peace talks Memorandum of Understanding.

Perjanjian Perdamaian Komprehensif atau biasa disebut *Naivasha Agreement* merupakan hasil dari 3 tahun negosiasi perdamaian antar kedua pihak, yang difasilitasi oleh IGAD. Perjanjian tersebut berisi beberapa hal seperti tindak lanjut dari pasukan militer setiap kubu, otonomi daerah, kekayaan minyak, isu ekonomi, administrasi, serta Hukum Islam. 6 tahun setelah pengaplikasian perjanjian tersebut, akan diputuskan kelanjutan negara Sudan Selatan melalui sebuah referendum. Rakyat Sudan akan diberikan pilihan setelah 6 tahun integrasi pemerintahan kedua pihak (yaitu Januari 2011), apakah rakyat Sudan Selatan menginginkan persatuan, atau kemerdekaan.

Dalam perjanjian *Naivasha*, pasukan militer dari Sudan Selatan dan utara tetap menjadi unit militer yang terpisah satu sama lain. Langkah pertama adalah penarikan 91.000 pasukan pemerintahan dari Sudan Selatan selama 2 setengah tahun, sedangkan pihak SPLA punya waktu 8 bulan untuk menarik pasukannya dari wilayah Sudan Utara. Direncanakan akan ada integrasi militer antar kedua pihak, dengan jumlah tertentu (jadi pasukan militer masing-masing pihak tidak secara langsung diintegrasikan selama 6 tahun periode integrasi pemerintahan). Walaupun akan diintegrasikan, masing-masing unit militer akan berada dalam komando yang berbeda, hanya berada dalam markas yang sama. Hasil referendum 6 tahun berikutnya, jika menghasilkan persatuan, maka integrasi militer akan dilakukan dengan jumlah yang lebih banyak.<sup>108</sup>

Dalam perjanjian 2005, masing-masing pihak tidak diberikan obligasi untuk menghilangkan pasukan militernya. Walaupun telah menyetujui gencatan senjata,

<sup>108</sup> Sudan Comprehensive Peace Agreement (CPA), 9 January 2005.

namun tetap masih ada rasa saling ketidakpercayaan antar kedua pihak. Hak untuk tetap memiliki unit militer dianggap sebagai sebuah mekanisme *check and balance*. Sepanjang jalan 6 tahun setelah diberlakukannya perjanjian CPA, ada kemungkinan salah satu pihak akan melanggar isi perjanjian yang telah disepakati. Suatu saat jika perang kembali pecah, setiap pihaknya mampu untuk melindungi diri mereka masing-masing.<sup>109</sup>

Otonomi dalam perjanjian *Naivasha* diberikan kepada Sudan Selatan. Otonomi ini bersifat sementara, sebab masyarakat Sudan Selatan akan dengan sendirinya memilih, apakah mereka menginginkan otonomi daerah (tetap sebagai satu negara Sudan), atau mereka ingin merdeka dari Sudan itu sendiri, membentuk Republik Sudan Selatan. Selama 6 tahun tersebut, penghasilan dari industry minyak yang ada di Sudan Selatan, akan dibagi dua.

Permasalahan yang paling utama dalam mendapatkan kesepakatan bersama selain masalah pasukan bersenjata masing-masing pihak adalah masalah administratif, serta penerapan hukum di Sudan selama 6 tahun tersebut. Disepakati bahwa sistem administratif akan dibelah menjadi 70:30 (mayoritas pemerintahan selama pemerintahan transisi). Kepala negara akan diduduki oleh Omar Al-Bashiir, dengan John garang sebagai wakil dari kepala negara Sudan. Hukum Syariah akan tetap diterapkan di Sudan Utara. Perombakan konstitusi akan dilakukan, untuk memastikan bahwa semua warga non-muslim tidak akan terikat pada Hukum Syariah yang bertolak belakang dengan kepercayaan mereka.

---

<sup>109</sup> Historic Sudan peace Accord signed. [http://articles.cnn.com/2005-01-09/world/sudan.signing.1.rebel-group-spla-darfur?\\_s=PM:WORLD](http://articles.cnn.com/2005-01-09/world/sudan.signing.1.rebel-group-spla-darfur?_s=PM:WORLD) Diakses tanggal 6 Juli 2011.

Sejak saat itu, perjanjian *Naivasha* diterapkan. Selama 6 tahun integrasi pemerintahan SPLA/M dengan pemerintahan pusat, beberapa konflik hamper pecah. SPLA/M mengundurkan diri dari perjanjian tersebut, sebab salah satu syarat tidak dipenuhi oleh pemerintahan pusat. Sampai kepada tahun 2007, Sudan Selatan tetap tidak mengundurkan pasukan Sudan Utara dari Selatan. Walaupun sempat memanas beberapa bulan, akhirnya redam setelah pasukan Sudan Utara di Selatan ditarik kembali pada tahun 2008.

Walaupun tidak sempurna, *Comrehensive Peace Agreement/ Naivasha* telah berhasil mengakhiri perang yang berlangsung selama 21 tahun, mengambil 2 juta nyawa rakyat (mayoritas kematian diakibatkan oleh kelaparan).<sup>110</sup> Dibandingkan dengan perang sipil pertama, ada beberapa hal yang menjadi penyebab perang sipil kedua Sudan berlangsung lebih lama, juga menelan lebih banyak korban dibandingkan perang sipil pertama.

Posisi pemerintahan Numeiri, Sadiq, dan Omar Al-Bashiir yang tidak memiliki keinginan apapun untuk menghapuskan, atau setidaknya melimitasi penerapan hukum Syariah, membuat para pemberontak memiliki alasan untuk tetap melakukan pemberontakan sampai hukum tersebut dihapuskan. Adanya dukungan oleh masyarakat local akan gerakan yang dilakukan SPLA/M serta kelompok pemberontakan lainnya juga ikut serta berkontribusi terhadap perpanjangan peperangan yang terjadi. Hal tersebut telah meningkatkan jumlah pasukan SPLA/M, serta akses ke berbagai daerah sebagai markas, maupun tempat peperangan yang baru.

---

<sup>110</sup> *History of Sudan peace Accord signed* <http://articles.cnn.com/2005-01->



Pada saat terjadi perpecahan internal dalam kubu SPLA/M, ikut serta berkontribusi terhadap perpanjangan konflik. Bagaimana pemerintahan Omar Al-Bashiir pandai melihat situasi, dan memberikan bantuan fasilitas kepada individu-individu yang ingin menggantikan posisi John Garang sebagai pemimpin SPLA/M. Salah satu alasan mengapa sebuah konflik terus menerus berlanjut, adalah karena adanya sumber daya yang cukup untuk melanjutkannya. Pemerintahan Sudan menemukan sebuah sumber pemasukan baru, yaitu minyak yang ditemukan tahun 1999. Bertambahnya pemasukan buat negara, mayoritas dialokasikan demi kepentingan perang sipil yang terjadi saat itu (pembelian peralatan perang, perangkat persenjataan). Sumber pemasukan, dan pasukan perangkat militer yang baru dan tidak terbatas menyebabkan terjadinya pemikiran bahwa pemerintahan pusat tidak mungkin kalah dengan sumber daya tidak terbatas tersebut. Demi gengsi, perang sipil tersebut dilanjutkan.

Perjanjian Naivasha telah menghentikan peperangan sipil yang terjadi sejak 1955. Gencatan senjata berhasil dicapai di Sudan saat itu. Masalah yang dihadapi oleh masyarakat Sudan Selatan adalah kepercayaan, apakah melalui integrasi yang disyaratkan dalam perjanjian Naivasha benar-benar dapat terjadi. Kepercayaan antar sesama rakyat Sudan merupakan suatu hal yang esensial dalam pembuatan perdamaian antar kedua pihak, mengingat bahwa perang yang berlangsung tidak singkat, dan usaha integrasi yang dilakukan sebelumnya selalu gagal. Akhirnya rakyat Sudan Selatan diberikan kesempatan untuk menentukan bagaimana nasib mereka di masa depan, melalui referendum. Apakah persatuan akan dicoba sekali

## 2. Campur Tangan Pihak Asing

Jauh dari berita media secara umum, keterlibatan pihak asing tidak mendapat porsi yang seharusnya dalam pemberitaan akar-akar konflik di Sudan. Dibagian ini penulis memberikan gambaran bagaimana keterlibatan pihak asing di Sudan.

### a. Israel

Israel memainkan peranan penting dalam memperkeruh perang sipil dan memecah belah Sudan. Israel sangat khawatir Sudan dapat menjelma menjadi salah satu negara pro Arab terutama Mesir dalam membela Palestina memerangi Israel.<sup>111</sup> Israel-lah yang membiayai para pemberontak di Sudan bagian selatan. Pernyataan ini bukan isapan jempol semata, mantan anggota Mossad, Brigjen Moshe Fergie menuliskan dalam bukunya, *Israel and the Movement for the Liberation of South Sudan*, terbit 2003, bahwa dukungan Israel terhadap para pemberontak Sudan Selatan dilakukan melalui lima fase: tahun 1950an, melalui bantuan kemanusiaan; di awal tahun 1960an, dengan melatih anggota-anggota "Popular Army" dibarisan depan Ethiopian; pertengahan 1960an-1970an, dengan mengirimkan berbagai senjata ke Selatan; di akhir 1970an-1980an, dengan mendukung pemimpin pemberontak John Garang; diakhir 1990an, dengan menyediakan Selatan dengan senjata berat melalui Kenya dan Ethiopia.<sup>112</sup>

<sup>111</sup> *Why Only Darfur?* [http://www.alternativeinsight.com/Why\\_Only\\_Darfur.html](http://www.alternativeinsight.com/Why_Only_Darfur.html). Diunduh pada 15 Februari 2012.

<sup>112</sup> *Story of Israel's hand in Sudan division.*

Selain sumber diatas, pernyataan serupa juga diketemukan dari sumber lainya sebagai berikut:

*Selanjutnya pada tahun itu, Joseph Lagu, Komandan Ekuatoria muda Anya-Nya membentuk kelompok perpecahanya sendiri – yakni Southern Sudanese Liberation Movement (SSLM) – dan mulai memperoleh profil, mengeruk keuntungan dari suplai senjata api dari Israel.<sup>113</sup>*

*Hingga 1969 para pemberontak telah mengembangkan kontak asing guna memperoleh senjata dan suplai. Israel, sebagai contoh, melatih rekrutan Anya Nya dan mengirim senjata melalui Eithopia dan Uganda kepada pemberontak. Anya Nya juga membeli senjata tangan dari para pemberontak asal Kongo dan pedagang senjata internasional dengan kekayaan yang diperoleh dari selatan dan dari rakyat Sudan wilayah selatan dari komunitas buangan di Timur Tengah, Eropa Barat, dan Amerika Utara. Pemberontak juga menangkap senjata, perlengkapan, dan suplai dari pasukan pemerintah.<sup>114</sup>*

*Pejabat Sudan mengatakan bahwa Israel telah menyediakan beberapa jenis senjata dan training kepada SPLA. Menteri Luar Negeri Sudan, Mustafa Othman Ismail menyatakan bantuan tersebut berupa suplai misil anti tank kepada para pemberontak melalui kedutaan Israel di Nairobi, Kenya. Bulan lalu, Ismail menyatakan keluhanya atas bantuan Israel kepada SPLA dalam suatu rapat dengan Sekretaris AS Colin Powell. Selanjutnya, menteri Sudan mengatakan ini merupakan kali pertama terdapat rapat seperti ini selama 15 tahun sebelumnya.<sup>115</sup>*

#### b. Amerika Serikat

Keterlibatan Amerika Serikat, seperti halnya Israel, dalam memecah dan melemahkan Sudan tidak terlepas dari usaha menghegemoni sumberdaya minyak dan uranium di negara ini. Dalam perkembangan usahanya, Pemerintah Amerika Serikat dalam mengeksplorasi sumberdaya di Sudan juga dibantu berbagai organisasi NGO pendukung Zionis, misalnya *National Endowment for Democracy*

<sup>113</sup> Abdel Salam Sidahmed dan Alsir Sidahmed. *Sudan*. New York. Routledge Curzon. 2005. Hal.40.

<sup>114</sup> *The South Sudan Problem*. <http://countrystudies.us/sudan/24.htm>. diakses pada 12 februari 2012.

<sup>115</sup> *Sudan rebels advance with new weapons from Israel* (World Tribune.com) [http://www.worldtribune.com/worldtribune/WTARC/2002/af\\_sudan\\_10\\_04.html](http://www.worldtribune.com/worldtribune/WTARC/2002/af_sudan_10_04.html). Diunduh pada

(NED) atau *Evangelicals and Establishment Jews*, dengan tujuan memperoleh imej internasional untuk menegakkan perdamaian di Darfur yang sedang dilanda konflik.<sup>116</sup> Bahkan disebutkan Pemerintah Amerika Serikat bersemangat dalam mengadu domba sesama penduduk Sudan wilayah utara dan selatan agar saling bertikai, sementara, atas nama studi geologi, pihak Amerika Serikat melakukan pengeboran di wilayah Darfur yang memang memiliki sumber daya minyak yang menyaingi Arab dalam jumlah cadangan sumbernya.<sup>117</sup> Selain itu, Pemerintah Amerika juga ikut dalam memberikan suplai senjata kepada pemberontak. Amerika Serikat juga yang memelopori isu *genosida* pada 2004 melalui mantan Menlu AS Collin Powell yang menyatakan terjadi *genosida* di daerah Darfur<sup>118</sup> yang pada akhirnya menyeret Presiden Sudan Omar Hasan Ahmad Al Bashir sebagai salah satu tersangka oleh International Criminal Court (ICC).

### c. Cina

Cina merupakan sekutu penting bagi Sudan: Cina selalu mempertahankan hubungan diplomatik dengan Sudan sejak 1959, dan hubungan maju ekonomi lebih-lebih selama produksi minyak dimulai. Cina merupakan rekan dagang ekonomi terbesar Sudan dan konsumen utama minyak Sudan, dengan empat puluh persen saham minyak Sudan. Pemerintah Khartoum bergantung pada Cina dalam urusan militer dan dukungan diplomatis, serta Cina bertanggungjawab terhadap

<sup>116</sup> Sara Flounders. *US Interest in Sudan* (The U.S. Role in Darfur, Sudan Oil reserves rivaling those of Saudi Arabia?). <http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=2592>. Diunduh pada 15 Februari 2012.

<sup>117</sup> Ismail S.H. Ziada. *Oil in Sudan: Facts and Impact on Sudanese Domestic and International Relations*. [www.sudantribune.com/IMG/pdf/Oil\\_industry\\_in\\_Sudan.pdf](http://www.sudantribune.com/IMG/pdf/Oil_industry_in_Sudan.pdf). Diunduh pada 15 Februari 2012. Hal 16.

<sup>118</sup> "Menteri Amerika serukan aksi untuk Darfur" lihat web

suplai sebagian besar senjata yang digunakan militer pemerintahan Khartoum. Pejabat Cina telah memberikan dukungan guna voting pemersatuan dalam referendum, meski mereka mengatakan Cina akan menghormati hasil dari referendum. Cina telah menyiapkan suatu hasil potensial kemerdekaan dengan memperkuat hubungan dengan Selatan, mendirikan suatu konsulat di Juba dan lebih banyak memerhatikan pejabat pemerintahan Selatan. Prioritas Cina di Sudan ialah ekonomi, jadi mereka lebih terfokus pada memertahankan industry oli yang kuat.<sup>119</sup>

d. Uni Afrika

*African Union* (AU) telah memainkan suatu peranan penting dalam proses pembentukan perdamaian di Sudan khususnya dikarenakan beragam konflik di Sudan berimbas terhadap Negara sekitar. Beberapa Negara Afrika, khususnya Kenya dan Eithopia, sangat mendukung GoSS dan setuju dengan kemerdekaan bagi Selatan. Chad mengalami gelombang pengungsi asal Sudan karena konflik Darfur. Mesir terlibat dalam alokasi penggunaan air sungai Nil. *African Union High Level Implementation Panel* bagi Sudan memonitor situasi dan menyediakan suatu forum bagi semua Negara Afrika untuk mengangkat keprihatinan mereka, selain memberikan dukungan kepada Sudan. AuMis di Sudan (AMIS) ialah

sebagai penegak penjaga perdamaian, yang sangat berguna sejak Sudan menolak misi perdamaian PBB.<sup>120</sup>

---

<sup>120</sup> *ibid.*, 7-10; *The Sudan Report*, M. I. C. (Institute for Domestic and Foreign